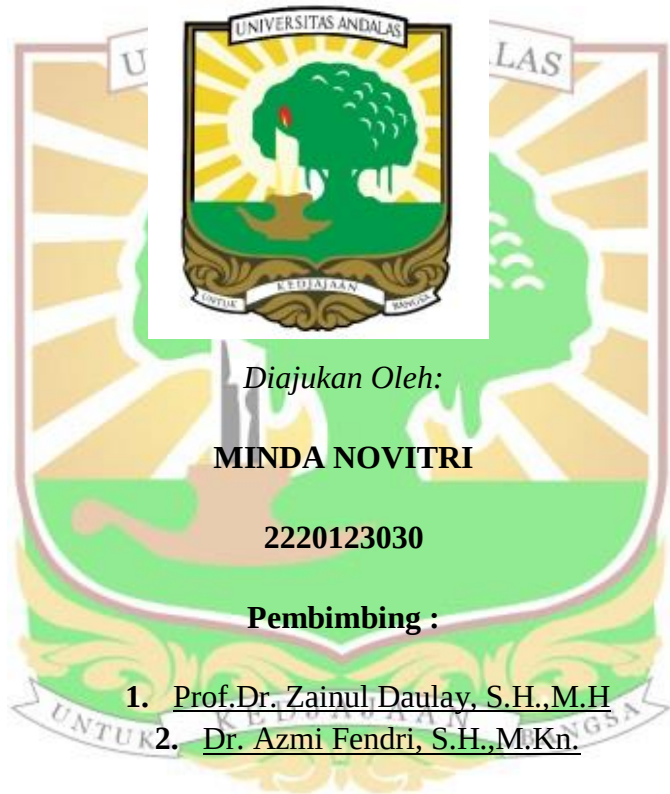


TESIS

**PENERAPAN SANKSI OLEH MAJELIS PENGAWAS WILAYAH
NOTARIS TERHADAP PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH
NOTARIS DI PROVINSI RIAU**

*Diajukan guna Memenuhi Persyaratan untuk Memperoleh gelar
Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum
Universitas Andalas*



Diajukan Oleh:

MINDA NOVITRI

2220123030

Pembimbing :

1. Prof.Dr. Zainul Daulay, S.H.,M.H
2. Dr. Azmi Fendri, S.H.,M.Kn.

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2025**

ABSTRAK

**PENERAPAN SANKSI OLEH MAJELIS PENGAWAS WILAYAH
NOTARIS TERHADAP PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH
NOTARIS DI PROVINSI RIAU**

Minda Novitri, NIM: 2220123030, Pembimbing I: Prof. Dr. Zainul Daulay, S.H., M.H., Pembimbing II : Dr. Azmi Fendri, S.H., M.Kn.

Notaris yang melakukan kesalahan ataupun kelalaian dalam menjalankan jabatannya dengan melanggar peraturan perUndang-Undangan yang telah ada, maka Notaris bertanggung jawab atas kesalahan maupun kelalaiannya. Majelis Pengawas Wilayah Notaris mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan sidang dalam memeriksa adanya dugaan terhadap pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris yang dilaporkan oleh masyarakat ataupun Notaris yang lain. Majelis Pengawas Wilayah berwenang memberikan sanksi baik peringatan lisan maupun peringatan tertulis. Sedangkan Majelis Pengawas Pusat berwenang menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti. 1) Bagaimana proses penjatuhan sanksi oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris di Provinsi Riau? 2) Apa dasar pertimbangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris?. Dengan menggunakan metode penelitian empiris, penelitian ini menyimpulkan bahwa Majelis Pengawas Wilayah secara teknis melakukan kewenangan sesuai dengan normatif saja, karena peraturan perUndang-Undangan sudah mengatur dengan signifikan, Peraturan tersebut terdapat pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif terhadap Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.

Kata Kunci: Notaris, Sanksi Notaris, Majelis Pengawas Wilayah

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF SANCTIONS BY THE REGIONAL SUPERVISORY COUNCIL OF NOTARIES FOR VIOLATIONS COMMITTED BY NOTARIES IN THE PROVINCE OF RIAU

Minda Novitri, NIM: 2220123030, Supervisor I: Prof. Dr. Zainul Daulay, S.H., M.H., Supervisor II : Dr. Azmi Fendri, S.H., M.Kn.

Notaries who make mistakes or negligence in carrying out their office by violating existing laws and regulations, the Notary is responsible for their mistakes or negligence. The Notary Regional Supervisory Council has the authority to hold hearings to examine allegations of violations of the Notary's Code of Ethics or violations of the performance of Notary's office reported by the public or other Notaries. The Regional Supervisory Council has the authority to give sanctions, both verbal warnings and written warnings. Meanwhile, the Central Supervisory Council has the authority to hold hearings to examine and make decisions at the appeal level against the imposition of sanctions and denial of leave. 1) What is the process for imposing sanctions by the Notary Regional Supervisory Council for violations committed by Notaries in Riau Province? 2) What is the basis for consideration by the Regional Notary Supervisory Council in imposing sanctions for violations committed by Notaries? By using empirical research methods, this research concludes that the Regional Supervisory Council technically exercises its authority in accordance with the normative only, because statutory regulations have regulated it significantly, these regulations are contained in Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notaries, Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Positions, Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 61 of 2016 concerning Procedures for Imposing Administrative Sanctions against Notaries and Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 16 of 2021 concerning Organizational Structure and Work Procedures, Procedures for Appointment and Dismissal and Budget for the Notary Supervisory Council.

Keywords: Notary, Notary sanctions, Regional Supervisory Council

